

IMPLEMENTASI PROGRAM WISATA SUNGAI DI KAWASAN PASAR SEKANAK PALEMBANG

Dian Anggraini¹⁾

¹⁾Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang
Jl. Sukarejo Sukatani Kenten Telp. (0711) 826043 Palembang
Email : bundafira81@gmail.com¹⁾

Abstract

The city of Palembang has many potential to be developed into a city of river-based historical and cultural tourism. One of the potential tourist attractions of the river is in The Pasar Sekanak, which flows through Sekanak River and in this area there are many heritage buildings. The potential contained in this area has not been seen supported by facilities to develop more optimally into a tourist area. Paying attention to this condition, the Palembang government through Dinas Pariwisata implemented a river tourism program with any problems in this implementation. The purpose of this study is to analyze the implementation of The River Tourism Program in the Pasar Sekanak as well as the factors that drive and inhibit the implementation of the program, achieved by using qualitative descriptive research methods. Data collection techniques, observation, interview and documentation. Research informants came from relevant stakeholders, namely the Palembang city tourism office, the surrounding community and 28 ilir sub-district Palembang. The result showed that the implementation of the river tourism program in The Sekanak market area is a program that refers to RIPPARNAS in 2010-2025, in the development of this region there are obstacles to lack of communication between stakeholders, lack of facilities and infrastructure for tourism support and still lack of professional human resources.

Keywords: *Implementation, River Tourism Program*

Abstrak

Kota Palembang memiliki beberapa wisata sungai yang dapat dikembangkan sebagai wisata sungai dan sejarah. Salah satunya adalah yang terdapat pada aliran Sungai Musi pada kawasan Pasar Sekanak karena terdapatnya bangunan bersejarah yang dapat dikembangkan sehingga menjadi daya tarik wisata. Namun demikian potensi wisata tersebut tidak didukung fasilitas optimal yang mendukung. Melihat kondisi tersebut Pemerintah Palembang melalui Dinas Pariwisata melaksanakan Program Wisata Sungai di Pasar Sekanak dengan berbagai masalah dalam pelaksanaannya tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan Program Wisata Sungai di Pasar Sekanak serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan berasal dari pihak yang berkepentingan dalam program di sekitar kelurahan 28 ilir Palembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Wisata Sungai di Pasar Sekanak mengacu pada RIPPARNAS dan masih memiliki beberapa kendala seperti kesenjangan komunikasi, fasilitas dan infrastruktur yang mendukung serta kualitas SDM yang profesional dalam pelaksanaan program tersebut.

Kata kunci: *Impementasi, Program Wisata Sungai*

1. Pendahuluan

Kekhasan Kota Palembang yang dialiri Sungai Musi yang menjadi lokasi pusat pemerintahan yang berawal dari *Wanua* Kerajaan Sriwijaya sampai dengan runtuhnya Keraton Kesultanan Palembang Darussalam. Besarnya fungsi sungai dan kekayaan sejarah yang tersimpan di sepanjang tepian sungai Musi dapat menjadi potensi wisata. Keberadaan Sungai Musi sebagai transportasi utama perekonomian masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian/perkebunan memberikan kesan atau suasana yang khas.

Sungai Musi merupakan cikal bakal kota Palembang secara historis kultural, sosial ekonomi dan fisik tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Sungai Musi. Sebagai kota tertua di Indonesia maka kota Palembang memiliki sejarah yang panjang dengan sejumlah julukan seperti *Het Indische Venetie* ; *de Stad der Twintig Eitlanden* atau *The City of Twenty Island* ; *de Stad des Vredes* atau *The City of Safety* (Gramberg, JS, 1878 & William Thorn, 1815 dalam Hanafiah, 1999).

Berdasarkan sejumlah julukan tersebut, kota Palembang memiliki dan menyimpan sejumlah kekayaan dan khasanah lansekap artefak budaya dan sejarah, utamanya dalam keterkaitannya dengan eksistensi Sungai Musi yang membelah kota ini, sehingga kota Palembang dapat menjadi salah satu model *Waterfront City* di Indonesia. (Sudabyo, Tutut)

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012 – 2032 disebutkan bahwa kawasan tepian Sungai Musi diarahkan untuk pengembangan pariwisata budaya, pariwisata sejarah dan pengembangan *waterfront city*. Dalam mewujudkan Kota Palembang sebagai Kota Wisata Sungai maka dengan adanya hasil nomenklatur dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka satu – satunya lembaga di daerah yang paling berkompeten di dalam bidang kepariwisataan adalah Dinas Pariwisata Kota Palembang selaku lembaga Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kepariwisataan di Kota Palembang.

Prioritas pembangunan kepariwisataan untuk lima tahun yang akan datang masih menitik beratkan kepada penyediaan sarana dan prasarana wisata. Sebagaimana yang terdapat pada RPJM kota Palembang tahun 2008 – 2013 yang dilanjutkan pada RPJM tahun 2013 – 2018 disebutkan bahwa pengembangan pariwisata Kota Palembang adalah untuk memperkuat fungsi dan peran wilayah dan Objek dan Daya Tarik Wisata unggulan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata nusantara maupun mancanegara. Dalam hal ini Objek dan Daya Tarik wisata unggulan banyak terdapat di tepian sungai Musi dan anak sungainya.

Perkembangan sektor pariwisata merupakan kontributor utama yang akan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kota Palembang. Terlihat kenaikan yang jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara ke Kota Palembang dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Palembang Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Wisatawan	Kunjungan	
		Jumlah (orang)	
(1)	(2)	5 Tahun Terakhir	
		Nusantara	Manca Negara
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	1.383.994	2.749	1.386.743
2013	1.660.871	6.246	1.667.117
2014	1.819.346	8.861	1.828.207
2015	1.724.275	8.028	1.732.303
2016	1.896.110	10.683	1.906.793

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas 1 & Dispar kota Palembang, 2017

Berdasarkan tabel 1, dalam lima tahun terakhir kota Palembang terus menerus mendapatkan kunjungan dari wisatawan, baik asing maupun domestik. Sejak diadakannya PON XVI – 2014, Kota Palembang terus menerus mengadakan *event* berskala internasional yang akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat Palembang. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan menjadi alasan untuk pengembangan sektor pariwisata terutama wisata sejarah dan budaya berbasis sungai.

Kekhasan Kota Palembang yang dialiri Sungai Musi yang menjadi lokasi pusat pemerintahan yang berawal dari *Wanua* Kerajaan Sriwijaya sampai dengan runtuhnya Keraton Kesultanan Palembang Darussalam. Besarnya fungsi sungai dan kekayaan sejarah yang tersimpan di sepanjang tepian sungai Musi dapat menjadi potensi wisata. Keberadaan Sungai Musi sebagai transportasi utama perekonomian masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian/perkebunan memberikan kesan atau suasana yang khas. Peraturan Walikota Palembang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penetapan Palembang Sebagai Kota Wisata Sungai yang dengan potensi Kota Palembang sebagai Kota Tepian Air (*Waterfront City*) yang mempunyai ciri khas tradisi budaya sungai, terutama di Kawasan Sungai Musi dengan beberapa anak sungainya dan sejalan dengan pencanangan “Palembang sebagai Kota Wisata Sungai” oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 September 2005. Hal ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan revitalisasi dan konservasi Sungai Musi yang cukup banyak mengandung nilai historis budaya khususnya di sepanjang tepian sungai baik bagian Ulu maupun bagian Ilir.

Konsep pariwisata kota Palembang bertujuan untuk mendukung pengembangan citra wisata kota, optimalisasi potensi objek wisata, diferensi produk, serta pemeliharaan pasar. Prioritas pengembangan obyek adalah menyediakan fasilitas wisata tidak hanya bagi wisatawan namun juga bagi masyarakat kota Palembang.

Adapun tujuan pengembangan kota Palembang adalah memperkuat fungsi dan peran wilayah dan ODTW unggulan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata nusantara maupun mancanegara.

Obyek dan Daya Tarik Wisata (*tourist attraction*) adalah segala sesuatu baik berupa panorama ala budaya atau kehidupan masyarakat pada suatu area yang menarik wisatawan berkunjung. Pada umumnya obyek dan daya tarik wisata dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Obyek dan daya tarik wisata alam yaitu yang menjadi andalan keindahan, fenomena atau panorama alam seperti pantai, gunung, sungai, taman laut, hutan, air terjun, sumber air panas dan sebagainya.
2. Obyek dan daya tarik wisata budaya adalah yang menjadi andalan sisi kegiatan budaya masyarakat, hasil karya, peninggalan sejarah, pusat seni budaya, pemukiman tradisional, festival budaya dan sebagainya.
3. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus yaitu obyek dan daya tarik wisata yang bertumpu kepada hal-hal khusus untuk kepentingan tertentu yang ada pada daerah tertentu seperti petualangan alam, wisata pertanian, wisata pusat budaya, desa kerajinan dan sebagainya.

Dalam rangka pengembangan kepariwisataan kota Palembang Pemerintah melalui Dinas Pariwisata telah membuat 15 (lima belas) program pengembangan destinasi wisata sungai, terdiri dari:

1. Program Penataan Kawasan Benteng Kuto Besak
2. Program Penataan Kawasan MONPERA
3. Program Penataan Kawasan Museum Sultan Mahmud Badaruddi II
4. Program Penataan Kawasan Sekanak
5. Program Penataan Jl. Temon
6. Program Taman Kampung Limas
7. Pusat Jajanan Malam Jl. Radial
8. Program Penataan Masjid Lawang Kidul
9. Program Penataan Pulau Kemaro
10. Program Kawasan Kompleks Assegaf
11. Program Kawasan Masjid Sungai Lumpur
12. Program Kawasan Klenteng 10 Ulu
13. Program Tepian Sungai Musi Seberang Ulu
14. Program Kampung Kapitan
15. Program Sentra Kerajinan Tuan Kentang

Kawasan Pasar Sekanak yang dahulu merupakan pusat transaksi ekonomi, dikarenakan Kawasan ini berlokasi di tempat yang strategis dengan adanya anak Sungai Musi yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Sungai Sekanak. Sungai Sekanak ini sering dilalui oleh pedagang dari Asia yang selanjutnya berdagang di kawasan tersebut. Jadi, sejak dari dulu sampai sekarang, kawasan ini memang selalu disibukkan dengan aktifitas perdagangan.

Untuk mendukung aktivitas kegiatan Pasar Sekanak dibangunlah Jalan dari Benteng Kuto Besak hingga ke 32 Ilir (saat ini) yaitu jalan Benteng Weg sebagai akses transportasi darat dan juga dibangun gedung gedung pergudangan di sekitar Pasar Sekanak dan Jalan Depaten, seperti Gudang Buncit dan Gudang Jacobson.

Yang berguna untuk menampung komoditi perdagangan dari Pasar Sekanak.

Baru pada sekitar tahun 1900 Kolonial Belanda membangun Pasar 16 sebagai pusat Adminstrasi dan Perbangkan, dengan menimbun Sungai Tengkuruk. Jadi saat itu untuk bongkar muat komoditi perdagangan dilakukan di Pasar Sekanak sedangkan untuk proses administrasi dan perbangkan dilakukan di Pasar 16. Adapun komoditi utama yang diperdagangkan di Pasar Sekanak seperti Karet, Kopi, Ikan, Pisang, rempah rempah, dan lain-lain.

Melihat besarnya potensi Kawasan Pasar Sekanak, maka program wisata sungai juga ditujukan untuk upaya memberikan peluang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja baru melalui kegiatan pariwisata. Menurut Cox (1985 dalam Dowling dan Fennel, 2003:2), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan lingkungan.
2. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas.

Dalam pelaksanaannya program pengembangan wisata sungai di kawasan Pasar Sekanak dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Berdasarkan fakta-fakta dilapangan terdapat beberapa penyebab permasalahan dalam program wisata sungai di kawasan Pasar Sekanak sebagai berikut:

1. Kondisi sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimen dan sampah.
2. Fasilitas penunjang wisata masih sangat minim, contohnya sarana dan prasarana yang belum lengkap, minimnya ruang parkir, belum optimalnya dermaga sungai, kurangnya promosi, buruknya sanitasi lingkungan
3. Atraksi masih sangat sedikit dan kurang bervariasi, seperti masih minimnya pedagang yang menggunakan perahu untuk mengembalikan suasana tempo dulu di perairan sungai Sekanak sebagai Pasar Terapung.
4. Belum terjalannya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sekitar, manajemen engelolaan yang belum profesional seperti penataan yang kurang menarik, degradasi visual (kotor , sampah berserakan)

Berdasarkan latar belakang masalah tentang Implementasi Program Wisata Sungai di Kawasan Pasar Sekanak Palembang belum terlaksana secara optimal, peneliti berkeinginan untuk memfokuskan pada persoalan penelitian seperti yang dirumuskan berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Program Wisata Sungai di Kawasan Pasar Sekanak Palembang ?
2. Faktor- faktor apa saja yang mendorong dan menghambat Implementasi Program Wisata Sungai di Kawasan Pasar Sekanak Palembang ?

2. Pembahasan

Secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil menurut Tahjan (2008:24). Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan. Ini pada dasarnya adalah kemampuan untuk membangun hubungan dalam mata rantai sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak (Parsons, 2006:466).

Berdasarkan Nugroho (2008:422) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik.

Pada tahap implementasi kebijakan, Dunn menyarankan agar dilakukan analisis berupa pemantauan/ *monitoring*, pemantau membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat – akibat yang tidak diinginkan, mengidentifikasi hambatan, dan menemukan pihak – pihak yang bertanggungjawab pada tiap tahap kebijakan.

Implementasi program merupakan komponen dalam suatu kebijakan menurut Jones (dalam Rohman, 2009:101-102). Menurut Syukur (1988:398) menjelaskan bahwa pengertian dan unsur-unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut:

1. Proses implementasi program ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula.
2. Proses implementasi dalam kenyataannya yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai “*outcomes*” serta unsur pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program.
3. Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat empat unsur yang penting dan mutlak yaitu :
 - a. Faktor lingkungan (fisik, sosial budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program pada umumnya.

- b. Target group yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut.
- c. Adanya program yang dilaksanakan.
- d. Unsur pelaksanaan atau implementator, baik organisasi ataupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi tersebut.

Sedangkan pengertian program secara umum menurut Westra (1989 : 236) mengatakan bahwa program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya.

Implementasi erat kaitannya dengan manajemen yaitu tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen (Keban, 2014:91). Dimensi ini memusatkan perhatian pada bagaimana mengimplementasikan apa yang telah diputuskan melalui prinsip-prinsip tersebut untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Hal tersebut dapat diterjemahkan dalam tahapan kegiatan yang berupa mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkannya. Menginterpretasi berarti menterjemahkan program ke dalam rencana untuk selanjutnya diorganisir dengan cara mengatur sumber daya, unit-unit serta metode serta melaksanakan program tersebut (Gordon, dalam Keban, 2014:76).

Dengan demikian rencana atau perencanaan yang merupakan bagian dari implementasi program sangatlah penting, sebaliknya perencanaan sebagai alat manajemen dalam mengimplementasikan suatu kebijakan/program (Gibson 2007:192).

George R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizin* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

A. Fungsi *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan (Hasibuan, 2016:93) adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu. Adapun unsur perencanaan (Terry, 2013:62) yang baik tercakup dalam unsur-unsur perencanaan yaitu :

1. Sasaran, berarti target yang direncanakan dalam mencapai tujuan.
2. Kebijaksanaan, merupakan jenis rencana yang paling penting dalam batas-batas yang ditetapkan.
3. Prosedur berhubungan dengan urutan kronologi yang tepat dari tugas-tugas spesifik yang perlu dilaksanakan untuk suatu pekerjaan tertentu.
4. Metode yaitu bentuk rencana yang terurai untuk melaksanakan suatu tugas khusus (spesifik).
5. Standar merupakan rencana yang berisi norma atau harapan untuk merencanakan jadwal, keseimbangan antara berbagai sumber yang ada serta menentukan kebutuhan.
6. Anggaran biaya (*budget*)

7. Pendekatan teknis berupa perencanaan waktu.

Perencanaan program wisata sungai di Kota Palembang mengacu kepada Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kota Palembang dengan sasaran yang mengacu pada Renstra tahun 2014 – 2018 ialah:

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif
2. Meningkatnya prosentase kunjungan wisata pertahun
3. Meningkatkan prosentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Namun demikian berdasarkan hasil penelitian belum dapat menunjukkan hasil yang memuaskan dikarenakan belum maksimalnya peran serta masyarakat sehingga dibutuhkan sosialisasi langsung ke masyarakat yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan termasuk pihak kelurahan sebagai unsur pemerintahan terkecil. Ditambah minimnya daya tarik yang ada disebabkan belum adanya fasilitas daya tarik wisata rekreatif yang representatif, serta aspek lain yang mendukung, seperti penghijauan terutama di koridor sungai Sekanak.

Prosedur Program wisata sungai adalah tahapan pelaksanaan program wisata sungai di Kawasan Pasar Sekanak yang direncanakan sesuai dengan kondisi di lapangan berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan program wisata yang mengacu pada Rencana induk Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Nomor 50 Tahun 2011 oleh Kementerian Pariwisata. Sebagai tahap awal adalah restorasi sungai berupa sosialisasi yang bertujuan untuk menata sungai agar bisa dilalui oleh perahu wisata sebagai sarana transportasi pariwisata yang belum terlaksana, namun demikian sosialisasi tersebut belum tersampaikan ke masyarakat secara maksimal.

Restorasi sungai Sekanak ini telah sesuai dengan metode yang telah ditetapkan dengan adanya kerjasama antar instansi dalam hal ini Dinas PU PR Kota Palembang. Metode yang digunakan dijadikan acuan sebagai daya dukung untuk pengembangan dan pencegahan degradasi kualitas obyek wisata yang ada sehingga dapat menghasilkan suatu jenis kegiatan yang berkualitas dan bernilai jual tinggi. Konsep pembangunan pada metode ini disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan pada masing-masing segmen kawasan pengembangan. Pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata daerah dikoordinir oleh Bappeda dan Litbang kota Palembang yang melibatkan stakeholder lainnya Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, BAPPEDA Litbang Kota Palembang menunjuk dan menentukan instansi pelaksana yang disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menangani sektor-sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Konsep disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan pada masing-masing segmen kawasan pengembangan. Pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata daerah dikoordinir oleh Bappeda dan Litbang kota Palembang yang melibatkan stakeholder lainnya dengan alokasi anggaran dana dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Adapun waktu dalam program pengembangan destinasi Wisata Sungai di Kawasan

pasar Sekanak berdasarkan penyusunan Rencana Tata Bangun dan Lingkungan Palembang Kota dan sekitarnya.

B. Fungsi Organizing (Pengorganisasian)

Pengertian pengorganisasian berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer (Terry & Rue, 2010:82). Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Dalam melaksanakan Program Wisata Sungai di Kawasan Sekanak tentunya perlu adanya perencanaan yang matang untuk melaksanakannya, untuk itu tentunya harus dilakukan suatu pengorganisasian untuk melancarkan selesainya Program Wisata Sungai di Kawasan Sekanak. Pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata daerah dikoordinir oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana teknis sektor kepariwisataan di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah nomor tahun 2016. Namun demikian Dinas Pariwisata Kota Palembang belum maksimal dalam menempatkan pegawai yang sesuai dengan pariwisata karena belum banyak pegawai Dinas Pariwisata yang memenuhi syarat, sering terjadinya mutasi kepelemipinan yang menyebabkan berubahnya kebijakan dan pelaksanaan program hal ini dapat menyebabkan kinerja yang tidak optimal.

Sarana dan prasarana sebagai pendukung utama dalam meningkatkan kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan hasil penelitian keadaan kondisi gedung perkantoran Dinas Pariwisata masih belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dikarenakan bergabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. Sampai dengan saat ini ruang rapat belum memadai dikarenakan daya tampungnya yang kecil serta tidak menggambarkan kondisi ruang rapat seperti tersedianya micropon di setiap meja. Peralatan/ fasilitas internet sudah ada tetapi jaringannya tidak merata dan sering macet sehingga menyulitkan untuk mengakses informasi.

C. Fungsi Actuating (Menggerakkan)

Fungsi Pengarahan) adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Menurut Siagian (1992:128) Penggerak adalah aktivitas pokok dalam manajemen yang mendorong dan menjuruskan semua bawahan agar berkeinginan bertujuan serta bergerak untuk mencapai maksud-maksud yang telah ditentukan dan merasa berkepentingan serta pada dengan rencana usaha organisasinya Penggerak dapat didefinisikan pula sebagai keseluruhan usaha, cara teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan menurut Terry (dalam Hasibuan,

2016:183) Actuating adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Manusia dan masyarakat memerlukan kepemimpinan sementara benda-benda fisik hanya memerlukan pengelolaan. Kepemimpinan diperlukan apabila diyakini bahwa kemajuan pariwisata sangat ditentukan oleh kualitas manusia dan masyarakat yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk pengembangan kepariwisataan diperlukan adanya kesadaran, keyakinan dan komitmen. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Dinas pariwisata Kota Palembang, bahwa keberhasilan kinerja program dalam pengembangan kepariwisataan Kota Palembang sangat didukung oleh para pelaku usaha wisata, masyarakat dan kegiatan seperti Sekanak Bersolek. Sekanak Bersolek adalah kegiatan untuk mempercantik kawasan permukiman warga pasar sekanak, mulai dari jembatan sekanak hingga jembatan karang yang dialiri sungai Sekanak dalam rangka mengembalikan citra Kota Palembang sebagai Venesia dari Timur. Proses pengecatan wilayah itu sudah dimulai, pengerjaan yang dilakukan baru sampai tahap pelataran jalan dam. Sekretaris Dinas Pariwisata mengatakan wilayah tersebut dipercantik dan dirapihkan untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara dalam rangka menyambut Asian Games 2018.

Komitmen pelaksana terhadap keberhasilan implementasi pengembangan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang diwujudkan dengan inisiatif untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program. Komitmen pelaksana untuk melibatkan masyarakat didasari kenyataan bahwa dalam kebijakan di bidang pariwisata, setiap program selalu berkaitan dengan sasaran program dalam hal masyarakat khususnya pelaku jasa usaha wisata dan masyarakat sekitar ODTW. Pemkot Palembang percantik kawasan Sungai Sekanak, menjelang perhelatan akbar olahraga Asian Games XVIII tahun 2018 dengan menambah sejumlah fasilitas infrastruktur pendukung pariwisata. Dalam waktu dekat akan dibangun pedestrian (kawasan pejalan kaki) sehingga para wisatawan dapat berlama-lama menikmati keindahan Sungai Musi. Setelah menuntaskan pembangunan pedestrian di Jalan Jenderal Sudirman, kini beralih ke Sekanak karena kawasan ini akan dijadikan destinasi wisata baru kota Palembang.

Keinginan Pemkot Kota Palembang menciptakan destinasi baru wisata ini tak lain karena ingin memanfaatkan momentum Asian Games XVIII tahun 2018. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan Ketua RT 04 Kelurahan 28 Ilir, program wisata sungai di kawasan Sekanak belum sepenuhnya disosialisasikan kepada masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program wisata sungai di kawasan ini.

Bentuk komunikasi dalam penelitian ini merupakan proses penyampaian informasi terkait pelaksanaan

program wisata sungai di Kawasan Pasar Sekanak dari pelaksana program kepada masyarakat. Prilaku masyarakat atau sasaran program yang tidak mendukung atau menjadi hambatan implementasi program wisata sungai. Sebagai solusinya melalui kebijakan yang diambil oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang guna mengatasi keterbatasan SDM dan jangkauan pengembangan kepariwisataan adalah inisiatif untuk melibatkan atau memberdayakan anggota masyarakat, khususnya di kawasan Pasar Sekanak.

D. Fungsi Controlling (Pengendalian)

Fungsi pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Menurut Robbinson dan Coulter (dalam Solihin, 2009: 193) Pengendalian (*controlling*) merupakan proses *monitoring* terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Koontz (Hasibuan, 2016: 241) pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. Tujuan pengendalian ialah:

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
2. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Rencana juga perlu dinilai ulang dan dianalisa kembali, apakah sudah benar-benar realistis atau tidak. Jika belum benar atau realistis maka rencana itu harus benar-benar diperbaiki. Sebagaimana diketahui, semua destinasi wisata di kota Palembang saat ini memang dikonsepsikan akan terintegrasi dalam satu kawasan. Mulai dari Kampung Mural Gudang Buncit, Tepian Sekanak Bersolek, Benteng Kuto Besak, Monumen Perjuangan Rakyat, Jembatan Ampera, pasar tradisional 16 Ilir hingga ke Pedestrian Sudirman. Kota Palembang, Sumatera Selatan memiliki potensi wisata yang tidak kalah dengan daerah lain jika benar-benar dikelola dengan baik. Salah satunya adalah potensi pasar terapung yang sudah diuji cobakan oleh Pemerintah Kota Palembang. Apa yang dilakukan Pemkot Palembang membuat pasar terapung di Sungai Sekanak untuk menghadirkan suasana tema Palembang Bingen atau Palembang Zaman Dahulu. Dari uji coba ini, akan dievaluasi dan diperbaiki oleh Pemkot apa yang harus dibenahi. Sebagaimana yang dilihat dalam gambar berikut dimana Uji coba nuansa Palembang Bingen pasar terapung dilakukan langsung Wali Kota Palembang.

Sementara itu Lembaga Riset Kajian Opini Publik Rumah Citra Indonesia (RCI) mengapresiasi upaya Pemkot Palembang untuk menghadirkan wisata

alternatif. Namun perlu ada catatan tentang bagaimana mempersiapkan hal tersebut secara matang sehingga tidak asal jadi. Penataan kawasan Sungai Sekanak perlu dilakukan sehingga tidak terkesan berantakan. Jika ada celah untuk penambahan pepohonan akan lebih menarik, serta kebersihan sungai jadi pekerjaan berat.

E. Faktor-faktor pendorong dan penghambat implementasi program wisata sungai sekanak

1. Faktor Internal

a. Motivasi

Faktor pendorong yaitu adanya tunjangan kinerja yang menjadi penghargaan bagi pegawai yang turut serta menyukseskan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Palembang.,faktor penghambat ketergantungan terhadap atasan menjadikan pegawai Dinas Pariwisata kurang berpartisipasi aktif dalam memberikan ide-ide dalam pengembangan destinasi wisata.

b. Kesadaran dan tanggung jawab

Adanya kesadaran pelaksana untuk mengambil inisiatif untuk menjadikan masyarakat bukan sekedar sebagai sasaran program tetapi sekaligus pelaksana program yang dilakukan dan sanksi administrative bagi pegawai yang tidak melaksanakan tugas. Faktor penghambat adanya *overlapping job* dikarenakan ketidakkejelasan dalam pembagian tugas yang mengakibatkan menurunnya semangat kerja

2. Faktor Eksternal

a. Kesempatan

Melibatkan masyarakat ke dalam program wisata sungai artinya memberikan kesempatan untuk masyarakat turut serta menjaga dan melestarikan lingkungan di kawasan sekitar Sekanak, sekaligus menikmati manfaat secara langsung program wisata sungai. Salah satunya dengan membuka usaha wisata kuliner disekitar ODTW. Faktor penghambat kurangnya anggaran untuk sosialisasi dan penyuluhan mengenai program wisata sungai.

b. Akses Informasi dan Teknologi

Adanya web yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang yaitu www.palembang-tourism.com dan untuk Objek dan Daya Tarik Wisata Kawasan Sekanak pun sudah bisa diakses melalui media sosial Instagram dengan akun sekanak bersolek_goedangboentjit. Faktor penghambat *overload job* sehingga mengakibatkan kurang aktifnya admin akun instagram untuk mengupdate informasi.

c. Kelembagaan

Pengembangan pariwisata diperlukan keterlibatan semua pihak melalui wadah Podarwis agar program yang akan dilaksanakan berjalan optimal. Kurangnya dukungan masyarakat dalam pemebntukan pokdarwis.

d. Kebijakan Program wisata sungai

Kebijakan untuk membenahi dan mengembangkan Kota Palembang sebagai Kota wisata berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penetapan Palembang Sebagai Kota Wisata

Sungai yang dengan potensi Kota Palembang sebagai Kota Tepian Air (*Waterfront City*), yang menjadi kendala ialah tidak adanya sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar.

e. Sarana dan prasarana wisata

Prasarana jalan dan transportasi yang lancar dan terjangkau oleh wisatawan menjadi faktor pendorong pengembangan wisata sungai dikawasan Sekanak. Kendalanya ialah kurangnya anggaran sehingga fasilitas penunjang dibangun secara bertahap.

f. Pembiayaan

Mengingat terbatasnya keuangan negara bisa menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan ODTW di kawasan Pasar Sekanak. Sehingga yang menjadikan faktor pendorong ialah kerjasama dengan masyarakat untuk turut serta membangun ODTW.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dari pengamatan dan analisis data yang ditemukan di lapangan pada saat penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa : Program Program Wisata Sungai di Kawasan Pasar Sekanak merupakan program yang bersumber dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025. Hal ini dapat diketahui melalui indikator sebagai berikut :

1. Perencanaan implementasi Program Wisata Sungai di Kawasan Pasar Sekanak terdiri dari penentuan sasaran pengembangan daya tarik wisata di kawasan Sekanak melalui tahapan prosedur yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025. Dituangkan ke dalam Kawasan Strategis dan Pariwisata Nasional (KSPN) Kota Palembang danmasuk ke dalam program pengembangan destinasi wisata. Pengembangan kawasan ini dibuat secara bertahap selama 5 tahun, sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pasar Sekanak.
2. Proses pengorganisasian dalam pelaksanaan program wisata sungai di Kawasan Pasar Sekanak ialah melibatkan pelaksana yang terlibat langsung dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Palembang dengan pembagian kerja yang jelas sesuai dengan Perwali nomor 68 tahun 2016. Kendala yang dihadapi ialah kualitas dan kuantitas SDM yang masih kurang, kondisi sarana dan prasarana kerja yang belum memadai.
3. Dalam pengembangan kawasan Pasar Sekanak ada berbagai pihak yang menjadi pemangku kepentingan yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang *leading sector-*nya ada di Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, maka dibutuhkan komunikasi dan koordinasi agar program ini bisa berjalan secara tepat dan efisien. Kendala yang dihadapi kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pelaksana salah satunya dengan pihak Kelurahan 28 Ilir Palembang.

4. Proses pengawasan melalui pembandingan Kawasan Pasar Sekanak sebelum dan sesudah Program wisata sungai, kendala yang masih dihadapi sesudah program ialah masyarakat masih membuang sampah ke sungai, pedagang kaki lima yang masih menempati trotoar dan masih banyak bangunan heritage yang belum dilestarikan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solihin. 2005. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Abdullah, M.Syukur. 1988. Analisis Perkembangan Studi Implementasi. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
- Adisasmito, Wiku. 2008. Analisis Kemiskinan, MDGs dan Kebijakan Kesehatan Nasional, Seri Studi Kasus tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. J.Kebijakan Publik. 3 (12) : 1975-1980.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta.
- BPS. 2008. Data Dan Informasi Kemiskinan 2008. Jakarta. Indonesia.
- Bintoro. Tjokroamidjoyo. 1987. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Burhan, Bungin. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Raja Grafindo. Jakarta.
- Cholisin. 2002. Militer dan Gerakan Prodemokrasi. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Creswell, J.W. 2007. Research Design : Kualitatif, Quantitatif, and Mix Methods Approaches (Second Edition). SAGE Publications Inc, Los Angeles, USA.
- Departemen Sosial R.I. 2012. Pedoman Umum PKH (Program Keluarga Harapan). Dit. Jamkesmas, Ditjen.Banjamsos.
- Damanik, Grace Leliharni. 2008. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Selayang.
- Departemen Sosial R.I. 2015. Buku Kerja Pedamping dan Operator PKH (Program Keluarga Harapan). Dit. Jamkesmas, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Gibson, James L. 1997. Manajemen (Edisi Kesembilan). Erlangga. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 1991. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. BPFE. Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu. 1994. Manajemen Sumber Daya Manusia. CV. Haji Masagung. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Program Pembangunan yang Berkeadilan.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi). Rineka Cipta. Jakarta.
- Kholif, Khoidziah Isnaini, Irwan Noor dan Sisdianto. 2013. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Jurnal Administrasi Publik. 2 (4) : 709-714.
- Manila, I.GK. 1996. Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Widya Press. Jakarta.
- Manullang, M. 1996. Dasar-Dasar Manajemen. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Miles, dan Huberman. 1992 Analisis Data Kualitatif. Dialihbahasakan oleh Tjetjep Rohendri Rohidi., PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nazir. 2003. Metode Penelitian. Salemba Empat. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2008. Kebijakan Publik : Untuk Negara-Negara Berkembang. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Rohman, Arif. 2009. Politik Ideologi Pendidikan. Mediatama. Yogyakarta.
- Sarwoto, 1977. Dasar-Dasar Organisasi Management. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan S. Efendi. 1989. Metode Penelitian Survei. PT Pustaka LP3ES, Jakarta, Indonesia.
- Sugiyono. 2011. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Supriatna, Tjahya. 1997. Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan. Humaniora Utama Press. Bandung.
- Sriati, MS. 2012. Metode Penelitian Sosial. Unsri Presss. Palembang.
- Stonner, James A.F. 2003. Manajemen (Jilid II). Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Syafi'ie, Inu Kencana dkk. 1999. Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta. Jakarta.
- Tahir, Arifin. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pustaka Indonesia Press. Jakarta.
- Tarigan, Antonius. 2000. Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat, Tesis Masigter Administrasi Publik UGM Yogyakarta.
- Terry, George R. 2013. Prinsip-Prinsip Manajemen. Terjemahan oleh : J.Smith D.F.M. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Terry, George R dan Leslie W. Rue. 2010. Dasar-Dasar Manajemen (Cetakan Kesebelas). Terjemahan oleh : J.Smith D.F.M. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Utomo, Dedy. Abdul Hakim dan Heru Ribawanto, 2013. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*. 2 (1) : 29-34.

Westra, Pariata, dkk. 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. PT. Gunung Agung. Jakarta